**Menakar Potensi Eliminasi Diskriminasi Gender**

**(Studi Analisis Proses Formulasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pendidikan)**

Wuri Handayani

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Email : whandayani@unj.ac.id

***Abstract***

*This policy’s study aims to predict potential in attaining Gender Equality in Education by analysing the agenda setting and formulation processes of Gender Mainstreaming (GM) Policy in education. This study is a theoretical review, using multiple perspectives of other relevant disciplines, analyse the circumstances of the agenda setting process, the formulation – an explicit statement of the goals, the definition of the public problem, the strategy used to attain the goals. This study used the secondary data that are the legal documents (Inpres number 9,2019, and Permendiknas number 84, 2018) and the relevance literatures. The results of this study indicate that political (economic) factor and the level/legality status of this policy were more dominant being the policy character rather than its pragmatic. Discrimination gender in education is a complicated, subtle and the power relationship social problem. From the beginning process of its policy arrangement, it contains the great potential obstacles in attaining the aim. This study supposed to get the better information or knowledge about the agenda setting and formulation process before.*

***Keywords: Gender mainstreaming, Gender discrimination, Gender equality, Public problem.***

**Abstrak**

Tujuan studi kebijakan ini adalah memperkirakan potensi tercapainya keadilan gender bidang pendidikan dengan menganalisis proses *agenda setting* dan formulasi kebijakan PUG bidang pendidikan. Studi ini adalah kajian teoritis, menggunakan beberapa perspektif disiplin lain yang relevan, menganalisa keadaan “sekitar” proses tersebut, formulasi - tujuan yang dinyatakan secara eksplisit, pendefinisian gender sebagai problem publik dan strategi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Studi ini menggunakan data sekunder yaitu dokumen legal (Inpres nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang Pendidikan) dan data sekunder lain yang relevan. Hasil studi mengindikasikan adanya faktor politik (ekonomi) dan level atau status legal kebijakan lebih dominan menjadi karakter kebijakannya dibandingkan dengan segi pragmatisnya. Keadilan gender merupakan problem sosial yang kompleks, subtil dan hubungan kekuasaan. Dari awal fase proses pembentukannya kebijakan ini “membawa” atau mengandung potensi hambatan besar bagi upaya pencapaian tujuannya. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dari proses pembentukan dan formulasi kebijakannya.

***Kata Kunci: Pengarusutamaan gender, Kesetaraan dan keadilan gender Pendidikan, Problem publik***

**PENDAHULUAN**

Belakangan ini menjelang tahun ajaran baru banyak orangtua murid mengalami kebingungan dan keresahan dalam upaya mendaftar sekolah bagi putra-putrinya. Tidak sedikit calon siswa yang galau terkait keinginan untuk menjadi siswa di suatu sekolah yang diidealkan. Kebijakan Zonasi yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2017 dengan tujuan baik yaitu pemerataan pendidikan, menumbuhkan pro dan kontra masyarakat, bahkan memunculkan permasalahan baru. Salah satu implikasinya, terjadi pemalsuan SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu) oleh orangtua – suatu contoh langsung tindakan tidak tepuji bagi anaknya, si calon siswa. Terlepas dari ketidakkonsistenan implementasinya dan formulasinya, kebijakan sistem PPDB zonasi telah menginformasi kepada masyarakat bahwa ada permasalahan ketidakadilan pendidikan sehingga pemerintah menetapkan kebijakan yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan.

Menengok ke masa sebelumnya, ada beberapa kebijakan pendidikan yang juga menumbuhkan pro kontra kuat di masyarakat seperti kebijakan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), kebijakan *full day*, kebijakan Moratorium Ujian nasional, kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pendidikan dan lainnya. Kebijakan yang diniatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini mengalami dinamika implementasi dan dampaknya, tidak atau belum dapat mewujudkan tujuan yang ditetapkan secara normatif (Koesoema, 2019). Fenomena pro kontra masyarakat atas implementasi kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut menimbulkan tantangan untuk mengelaborasi apa sebenarnya yang terjadi dengan kebijakan pendidikan tersebut.

Seperti juga kebijakan di bidang lain, kebijakan pendidikan pada hakikatnya adalah suatu komitmen pemerintah untuk membangun pendidikan menjadi seoptimal mungkin mencapai kualitas pendidikan yang tinggi, menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang tangguh sebagai kader pembangunan bangsa dan negara menuju masyarakat sejahtera. Sebagai salah satu ciri demokrasi dan kehidupan berbangsa yang modern, kebijakan publik mempunyai posisi strategis bagi pembagunan suatu bangsa. Studi kebijakan publik penting, membantu upaya pemecahan problem sosial di masyarakat. Kebijakan publik sebagai sarana pencapaian tujuan pembagunan pendidikan berperan strategis. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya. (Nugroho, 2009)

Dalam rangka refleksi terhadap kebijakan, tulisan ini mengaji tentang kebijakan PUG bidang pendidikan, yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah menimbulkan pro kontra juga di masyarakat. Kebijakan PUG bidang pendidikan adalah berupa serangkaian kebijakan: antara lain Inpres nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, Permendiknas nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Pendidikan dan Panduan Umum PUG bidang Pendidikan Kemendikbud Tahun 2013 dan lainnya. Kebijakan PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui penyusunan kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi/kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan PUG pendidikan dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi gender atau mencapai (KKG) di bidang pendidikan. Kebijakan PUG ditetapkan pemerintah setelah meratifikasi konvensi internasional tentang perempuan. Dengan mengadopsi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) berarti PUG menjadi filosofi untuk mencapai KKG. Perspektif gender dan perhatian pada KKG secara normatif sentral bagi semua aktivitas pembangunan. Dalam konteks ini melalui pendidikan diharapkan dapat merubah persepsi dan mentalitas mengenai gender dan mendorong kemajuan akibat dari kondisi-kondisi viktimisasi pada perempuan (Ersoz, 2012).

Fenomena problem sosial gender yang antara lain ditunjukkan dalam data statistik kesenjangan gender dalam pendidikan dan fenomena-fenomena diskriminasi dalam proses pembelajaran (Handayani, 2018) serta kajian teoretik (Galliano, 2003), mengindikasikan adanya ketidakadilan atau diskriminasi gender dalam pemenuhan kualitas dan kuantitas pendidikan. Diskriminasi pendidikan sangat terkait dengan masalah gender, terjadi ketidakseimbangan gender dalam semua proses pendidikan (Woolfolk, 2007)

Beberapa indikator *gender equality,* ada tiga dimensi – pendidikan: dimensi ekonomi (prosentase laki-laki dan perempuan pada pekerjaan dan pendapatan, dan sebagainya), dan dimensi pemberdayaan (*empowerment) -* prosentase laki-laki dan perempuan dalam parlemen, manajer dan lainnya (Demetriades, 2007) menggambarkan kesenjangan gender. Data di BPS Rata-rata lama sekolah penduduk usia ≥15 tahun yaitu laki-laki 8,75 tahun dan perempuan 8,09 tahun. (Badan Pusat Statistik, 2017) Di bidang ekonomi jabatan manajer tahun 2016 laki-laki sebanyak 75,83% dan perempuan 24,17%. Sumbangan pendapatan oleh perempuan pada tahun 2017 adalah 36,63%, sedangkan oleh laki-laki 73,37%. Di bidang politik keterlibatan perempuan dalam parlemen pada tahun 2017 sebesar 17,32% (Badan Pusat Statistik, 2019) Jumlah guru yang kurang berimbang yaitu guru di pendidikan dasar didominasi guru perempuan. Hal ini juga merupakan salah satu faktor terjadinya diskriminasi gender dalam pendidikan, sebab guru-guru perempuan cenderung berkonsentrasi pada *“nursery*” atau “*caring orientation”* sebagaimana peran gender tradisionalnya. (Vivien Burr, 1998). Posisi jumlah penduduk tahun 2018 yaitu 265.015.300 laki-laki sebesar 133.143.687 (50,24%) dan perempuan 131.871.613 (49,76%), Berikut disajikan contoh data kesenjangan gender.

**Tabel 1.1**

**Contoh Indikator Kesenjangan Gender**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kesenjangan Gender | Perempuan (%) | Laki-laki (%) |
| Angka Buta huruf penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas, (Badan Pusat Statistik, 2017b) | 5,64 | 2,53 |
| Penduduk Indonesia umur >10 tahun tidak/belum pernah sekolah, (Badan Pusat Statistik, 2017a) | 5,68 | 2,63 |
| Presentase Guru:  (Kemendikbud, 2017)  SLB SD SMP SMA Umum  SMK  PT (Kemenristekdikti, 2017) | 72,45  68,37  60,79  58,89  52,96  43,75 | 27,55  31,63  39,21  41,11  48,04  56,25 |

Data statistik tentang pemilihan bidang studi, nampak adanya pengaruh identitas gender. Mahasiswa di suatu fakultas Teknik berjumlah 843 orang, 517 orang mahasiswa laki-laki sedangkan sisanya 326 orang perempuan. Di bidang Ilmu Sosial, mahasiswa berjumlah 674 orang, laki-laki sebanyak 259 orang dan perempuan sebanyak 415 orang. Di fakultas Ilmu Pendidikan mahasiswa berjumlah 1109 orang, laki-laki sebanyak 229 orang dan perempuan sebanyak 880 orang (UNNES, 2016). Walaupun berkurang namun masih ada segregasi yang tinggi pada mata pelajaran yang dipelajari siswa, yaitu siswa laki-laki belajar sains dan siswa perempuan mengambil jurusan seni (Walby, 2014).

Fenomena ketidakadilan gender pendidikan juga bisa dilihat dalam proses pembelajaran. Kajian empiris menunjukkan terjadi perbedaan intensitas interaksi guru (bisa tidak disadari) dengan siswa laki-laki 1,23 kali lebih banyak dibandingkan dengan siswa perempuan (Handayani, 2017). Di dalam proses pembelajaran terjadi proses internalisasi, eksternalisasi dan obyektivasi nilai-nilai gender baik oleh siswa laki-laki, siswa perempuan dan juga oleh guru dalam interaksi sosialnya. Walaupun ada upaya pemerintah merevisi beberapa bacaan siswa di sekolah agar tidak bias gender, namun literasi lainnya mendemonstrasikan ketidakadilan gender, seperti tayangan di televisi, pada “*game*” yang bisa diakses melalui *smartphone* atau alat teknologi lainnya. Cerita-cerita fiksi dan produksi informasi lainnya banyak menempatkan secara tidak setara dan adil antara peran, status, “nilai”, kemampuan laki-laki dan perempuan.

Sosialisasi nilai-nilai gender ini dapat mendorong terciptanya imaji-imaji siswa yang kurang progresif baik dalam aspek kognitif, afektif mapun motorik. Menurut Galliano, problem sosial gender dalam pendidikan adalah menunjuk pada perilaku-perilaku dan proses-proses kognitf dan sejumlah perbedaan yang dapat diamati antara laki-laki dan perempuan. Walaupun ada inkonsistensi hasil penelitian tentang hal itu, namun adanya stigmatisasi *disempowered* perempuan mempengaruhi kepercayaan perbedaan kemampuan mereka. Ketidakadilan gender pendidikan demikian dapat mengakibatkan terjadinya “*shortchanged*” siswa dalam proses pendidikan (Galliano, 2003), suatu hasil pendidikan yang kurang optimal.

Fokus kajian ini antara lain memposisikan dengan studi-studi terkait sebelumnya, untuk mendapatkan konteks permasalahan pada area kajian kebijakan PUG pendidikan. Studi analisis kebijakan pendidikan berwawasan gender di Universitas Negeri padang dilakukan oleh M. Jabar, Dj. Djamas dan Latisma Dj, bertujuan mendapatkan profil gender tentang mahasiswa dan staf pengajar setiap jurusan, akses dan pemerataan, mutu, dan relevansi, dan manajemen pendidikan; disparitas gender. Dengan analisis gender *pathways*, hasil studinya, ada 4 poin faktor ketidaksetaraan gender yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Peneliti menganggap perlu adanya reformulasi kebijakan pendidikan yang tercantum dalam arah kebijakan pengembangan Universitas Negeri Padang/ Fakultas/ unit-unit (yang masih netral gender) dengan menetapkan secara eksplisit kesetaraan dan keadilan gender (Jabar, Djamas, & Dj, 2012).

Studi kedua, Edison dengan judul Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). mendiskusikan kebijakan pendidikan sekolah RSBI. Hasil studi disebutkan secara ringkas bahwa RSBI dihapuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-X/2012 terhadap inkonstituasionalnya RSBI-SBI. Peneliti mengharap pemerintah komitmen terhadap mutu dan kualitas pendidikan berdaya saing internasional tanpa bertarif internasional, dengan merubah mindset yang mentradisi mengenai kebijakan/program yang biaya “*oriented*”. (Edison, 2013). Studi Analisis PUG dengan studi kasus yang dilakukan oleh Wewen KR bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang responsif gender dengan teknik *Gender Analysis Pathways*. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan PUG yang dilaksanakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah masih belum bisa mengatasi permasalahan gender. Hal yang mempengaruhi diantaranya tata nilai adat, istiadat, kemauan dan kemampuan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keberadaan media massa. (Rahayu, 2017)

Studi Novita Tresiana dengan judul Perumusan Kebijakan Pendidikan yang Berperspektif Gender di Provinsi Lampung menggagas urgensi kebijakan pendidikan berperspektif gender melalui integrasi perspektif gender dalam setiap kegiatan/program.Tulisan ini mengungkap kegagalan pengitegrasian perspektif gender dalam kebijakan/program pendidikan yang disusun oleh Dinas Pendidikan. Faktor penyebabnya adalah lemahnya pemahaman aktor, letak otoritas tidak dalam struktur fungsional, sehingga gender menjadi program eksklusif bukan berintergrasi pada semua program. (Tresiana, 2015)

Penelitian di atas merekomendasikan bahwa perlu reformulasi kebijakan agar lebih dapat menyelesaikan problem publiknya dan mencapai tujuannya. Kajian ini menginformasi adanya permasalahan pada kebijakan pendidikan tersebut. Dari penelitian sebelumnya di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi studi kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan demi progresivitas kebijakan terkait.

Dari aspek yang berbeda penelitian di atas, studi kebijakan ini mengaji tingkat pencapaian tujuan kebijakan dengan menganalisis karakter kebijakannya yang dapat dipahami dari substansi kebijakannya, menggunakan pendektan mikro untuk memahami problem sosial gender dalam pendidikan. Dengan mendasarkan fenomena adanya PUG bidang pendidikan di masyarakat tersebut, permasalahan yang perlu dikaji adalah “Bagaimanakah potensi kebijakan PUG pendidikan dalam menghilangkan atau meminimalkan diskriminasi gender atau mencapai KKG pendidikan dikaji dari proses *agenda setting* dan proses formulasinya?” Tulisan ini merupakan salah satu bentuk upaya mendekatkan kebijakan PUG pendidikan dengan fakta empiris problem sosial ketidakadilan gender dalam pendidikan, agar didapat informasi atau pengetahuan demi progresivitas pencapaian tujuannya yaitu eliminasi diskriminasi gender dalam pendidikan. Secara normative formulasi adalah proses tawar menawar, untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses *agenda setting* dan formulasi dari suatu kebijakan (Majchrzak, 1984).

**METODE**

Studi kebijakan adalah tipe proses kebijakan dengan orientasi tindakan (*action oriented*) dan problem sosial fundamental (*a concern for fundamental social problems*) (Majchrzak, 1984). Studi kebijakan ini adalah studi dimensi substantif (*substantive content*), mengaji permasalahan sekitar bagaimana pemecahan problem publik (Knoepfel, Larrue, & Hill, 2007), menganalisis hubungan rangkaian substantif formulasi kebijakan. Untuk dapat menakar potensi kebijakan PUG pendidikan dalam mewujudkan tercapainya KKG pendidikan, studi ini mengelaborasi: proses penetapan isu agenda kebijakan dan formulasinya. Elaborasi proses *agenda setting* untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang penetapan ide dasar kebijakan PUG (pendidikan) dengan perspektif antara lain sosiologis, politik (ekonomi), hubungan internasional, psikologis-sosial, hukum, sehingga didapat informasi tentang nilai/kepentingan yang melatarbelakangi penetapan isu gender dalam agenda pembuatan kebijakan.

Poin penting selanjutnya adalah penetapan isu agenda kebijakan publik, yaitu penetapan problem sosial menjadi problem kebijakan publik. Problem publik adalah suatu konstruksi, karenanya penting mengaji persepsi, kepentingan dan nilai-nilai aktor politik individual maupun kelompok organisasional (Knoepfel et al., 2007). Kemudian mengaji konteks penetapannya, sebab kondisi dan situasi (*the* *circumstances*) penetapan isu agenda kebijakan menjadi faktor mendasar bagi pemahaman mengenai karakter kebijakannya. Karakter kebijakan publik merupakan faktor kritis bagi implementasinya (Thomas & Grindle, 2006)

Selanjutnya mengelaborasi formulasi kebijakan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana proses menggali dan memahami substansi dan spesifikasi problem publik gender bidang pendidikan oleh *decision* *maker* saat perumusannya. Kajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai elaborasi problem publik oleh *decision maker* tersebut apakah dilakukan secara deliberatif, sehingga didapatkan struktur problem publik gender pendidikan, dan diketahui problem dasarnya. Kemudian mengaji formulasi/rumusan kebijakan PUG pendidikan, dan selanjutnya menginterpretasikannya, untuk mendapatkan informasi mengenai hal mendasar seperti pendefinisian problem publik, pernyataan eksplisit dari Tujuan (*goals*), Sasaran dan Strategi yang ditetapkan secara formal untuk mencapai tujuan kebijakan. “Sifat orientasi kajian pada tindakan dapat dikaji dari konten kebijakan - pernyataan eksplisit Tujuan, kejelasan fokus dan batas-batasnya, sasaran serta strategi kebijakannya”. (Knoepfel et al., 2007). Kemudian dengan model kajian kausatif, menganalisis hubungan logis variabel *goals*, pendefinisian hal mendasar problem publik dan rencana strategi kebijakan. Analisis tersebut mengelaborasi mengaitkan rekonstruksi atau desain kebijakan sebagai satu keputusan dan strategi aktivitas yang disusun merujuk pada tujuan yang ditetapkan sebagai resolusinya.

Akhirnya, orientasi pada “*Social fundamental problem*” dengan perspektif deskriptif, studi ini mengelaborasi problem sosial gender secara khusus di bidang pendidikan dengan mendeskripsikan – mengidentifikasi fenomena sosial dengan mendasarkan pada konsep-konsep, pemikiran dan variabel-variabel terkait. Kegiatan ini untuk mendapatkan deskripsi secara jelas tentang struktur problem publik gender bidang pendidikan. Dengan strukturisasi ini akan mendapatkan penjelasan kualitas permasalahan dan jenjang problem publik gender bidang pendidikan. Kemudian dengan perspektif analitik - menyangkut pengetahuan tentang kebijakan publik - memahami serangkaian aktivitas sosial, mendemonstrasikan hubungan kausal antar fakta-fakta sosial.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Kebijakan PUG Bidang Pendidikan**

Kebijakan PUG Pendidikan merupakan serangkaian kebijakan pemerintah: Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Pendidikan dan Panduan Umum PUG bidang Pendidikan Kemendikbud tahun 2013 dan lainnya. PUG adalah strategi yang diterima secara global (USAGI, 2002). Dengan *mainstreaming* ini diyakini bahwa perspektif gender dan perhatian pada kesetaraan gender adalah **s**entral bagi semua aktivitas pembangunan. “Kesetaraan dalam hak merupakan tujuan pembangunan yang penting bagi pembangunan itu sendiri”. (King & Mason, 2001). Dalam konteks ini melalui Pendidikan diharapkan dapat merubah persepsi dan mentalitas mengenai gender dan untuk mendorong kemajuan dan kondisi-kondisi akibat viktimisasi pada perempuan (Ersoz, 2012).

PUG Pendidikan adalah strategi untuk mencapai KKG melalui penyusunan kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan. Dengan adanya Inpres ini berarti pemerintah telah menganggap gender sebagai problem sosial dan harus diupayakan penyelesaiannya melalui serangkaian kebijakan publik. Komitmen formal pemerintah Jokowi-JK terhadap problem sosial gender ditunjukkan dengan Perpres nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan melalui 3 tiga aspek pengarusutamaan, salah satunya gender (Peraturan Presiden, 2015). Berikut disajikan secara ringkas kebijakan/program PUG Pendidikan :

**Tabel 1.2**

**Kebijakan dan Program PUG Bidang Pendidikan**

| Kebijakan dan Program PUG Bidang Pendidikan | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Kebijakan PUG | Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Instruksi Presiden, 2000) | Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang Pendidikan (Kementrian Pendidikan Nasional, 2008) | Panduan Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan Kemendiknas 2013 |
| Tujuan kebijakan | mencapai KKG dalam berbagai sektor pembangunan | Mencapai KKG di bidang pendidikan. | Memberi arahan kebijakan PUG Pendidikan Pusat, Daerah, Satuan, dalam menyusun, melaksanakan, memantau mengevaluasi program /laporan |
| Strategi kebijakan | Mengintegrasikan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan dan program pembangunan sesuai bidang tugas dan fungsinya | Pengintegrasian pengalaman aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan ke dalam perencanaan pendidikan berperspektif gender. | Membuktikan aspek gender nyata dalam 4 fungsi utama manajemen program instansi: Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi (memastikan kesetaraan status perempuan dan laki-laki sebagai hasil prakarsa) |
| Sasaran | Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah, Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan lembaga tertinggi /Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, kepala kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Gubernur, Bupati /Walikota. | Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. | Kemendikbud, Dinas penanggungjawab pembangunan pendidikan, Provinsi, Kabupaten/Kota, pelaksana pendidikan di satuan pendidikan. |
| Program | -identifikasi: kesenjangan gender, manfaat pembangunan, sebab-sebab kesenjangan gender, KIE untuk pemahaman *stakeholder*, kegiatan perwujudan tujuan KKG, bantuan teknis. | Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dituangkan dalam RPJMD, RENSTRA dan RKPD : komitmen, program responsif gender, kelompok kerja, pelatihan, sistem informasi dan data pilah, alat analisis gender, panduan-panduan, modul-modul, jejaring. Proses pembelajaran: partisipatif, aktif laki-laki bagi dan perempuan, lingkungan fisik dan materi bahan ajar yang responsif gender. | Tingkat Kementerian: membangun komitmen, menyusun kebijakan dan program, membangun kelembagaan (Pokja: *Focal Point*), mengembangkan sumberdaya (*capacity building*), mengembangkan data pilah, mengembangkan alat analisis gender, panduan dan modul pelatihan dan sistem informasi |

Tabel di atas menginformasi secara hirarkhis Kebijakan Inpres nomor 9 tahun 2000 dapat dikategorikan sebagai “*the second level*” yaitu sebagai “*organization level*” setelah level pertama yaitu *Policy* *level*. Level organisasional adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Eksekutif (Broemly, 1989) Jadi pada level ini kebijakan tidak mengandung atau tidak sebagai *locus of control*. Inpres PUG ini lebih merupakan perintah/arahan teknis kepada institusi –institusi terkait melaksanakan PUG dalam menyusun program pembangunan. Inpres PUG tidak mempunyai kekuatan untuk “menghukum” implementor atas “pelanggaran” atas proses-proses kebijakannya. Sedangkan Permendiknas adalah level *operational*, suatu pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dari kebijakan.

Kebijakan PUG ditetapkan tahun 2000, dimana situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara masih belum stabil, sedang berlangsung dinamika sebagai implikasi dari masa atau gerakan reformasi 1998. Penetapan isu kebijakan PUG sebagai respon pemerintah atas fenomena kehidupan di masyarakat internasional. Globalisasi tidak dapat dielakkan, karena kehidupan internasional bersifat transnasional, fenomena di suatu negara dengan cepat “tembus” ke negara dan masyarakat lain di dunia. Kompetisi yang disebabkan globalisasi ekonomi mengakibatkan faktor global merupakan hal penting berkaitan erat dengan pembuatan kebijakan publik (Goodin, Moran, & Rein, 2009)

Penerimaan dan pengakuan pemerintah akan problem sosial gender ditunjukkan dengan penetapan kebijakan PUG, Inpres nomor 9 tahun 2000 merespon masalah hak asasi perempuan yang sudah menjadi masalah global. Kemudian Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai pedoman pelaksanaannya. Kebijakan publik adalah tentang dua konsep sentral: penetapan secara sosial struktur institusional yang menghambat maupun memfasilitasi tindakan individual dalam level operasional, dan pencarian batas-batas otonomi dari berbagai kebijakan. (Broemly, 1989) Dengan demikian elaborasi terhadap status/level kebijakan PUG Pendidikan dapat menginformasi tingkat atau batas otonominya dalam proses kebijakan selanjutnya (implementasi dan evaluasi) dalam mencapai tujuannya.

**Formulasi Kebijakan PUG di bidang Pendidikan**

Formulasi kebijakan adalah proses mengembangkan alternatif kebijakan untuk diselaraskan dengan tujuan kebijakan (Dye, 2017). Formulasi kebijakan merupakan hal yang mendasar karena akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan publik. Berikut ini disajikan informasi mengenai formulasi kebijakan PUG Pendidikan :

Tabel 1.3

Analisis Penetapan Agenda dan Formulasi Kebijakan PUG Pusat (Inpres Nomor 9 Tahun 2000, Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008)

115

| No. | Kebijakan | Tujuan/Isu kebijakan | Letak Pasal | Penjelasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inpres Nomor 9 Th 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional | Dasar penetapan isu kebijakan: Mengingat: “Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 no. 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)”  Tujuan Kebijakan PUG: meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, mewujudkan KKG dalam kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat berbangsa/bernegara.  Definisi gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.  Definisi Kesetaraan dan keadilan Gender | Pada poin “Mengingat”, angka 2.  Poin “Menimbang” huruf a.  “Menimbang”, poin b.  Lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Point 1. Umum, nomor 3. | Penetapan kebijakan PUG menunjukkan konsekuensi ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, oleh pemerintah, merupakan hasil konteks koordinasi kebijakan internasional.  Meningkatkan Kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, merupakan dimensi gender secara struktur-sosial dan institusional.  Pendefinisian konsep gender seperti ini hanya (lebih) melihat gender dari aspek sosiologis, yaitu berupa aktivitas fisikal (peran dan tanggungjawab).  Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berparisipasi dalam kegitan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan kemanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempun. (Lampiran Permendiknas 84 tahun 2008). |

Dari tabel formulasi kebijakan PUG pendidikan dapat diketahui bahwa poin penting yang dapat digunakan untuk menakar potensi pecapaian tujuan kebijakan adalah: pendefinisian problem publik gender, kejelasan makna tujuan (*goals*) kebijakan mencapai KKG dan strategi kebijakannya.

**Gender dalam Proses Pembelajaran: Sosialisasi Nilai-Nilai dan Identitas Peran Gender**

Gender adalah fenomena sosiologis sekaligus psikologis (Burr, 1998). Mengaji problem sosial gender dalam pendidikan dengan perspektif psikologis akan memberi pengetahuan yang lebih mendalam (*powerful*) mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan (Eagly H & (et. al), 2004). Gender dalam pendidikan difahami melalui ranah mikro, membahas persepsi aktor pendidikan (guru, siswa) dan interaksi antar mereka. Dengan pendekatan mikro akan mendapatkan pengetahuan pendidikan sebagai proses (pembelajaran) yaitu dimensi formasi kesadaran dan pemahaman individu terhadap apa yang terjadi di balik suatu fenomena. (Maliki, 2010)

Gender dalam pendidikan menunjuk pada perilaku-perilaku dan proses-proses kognitif dan sejumlah perbedaan yang dapat diamati antara siswa laki-laki dan perempuan (Galliano, 2003). Menurutnya gender adalah pusat proses pengorganisasian psikis seseorang. Siswa laki-laki cenderung akan menjalani karakter gendernya sebagai maskulin dan sebaliknya karakter feminin untuk siswa perempuan. Hal ini membatasi siswa pada “ranah gendernya” sebagai zona nyaman untuk bersikap dan berperilaku. Selain itu, gender didefinisikan sebagai serangkaian stereotip yaitu suatu kepercayaan siswa tentang karakteristik laki-laki dan perempuan, yang dianggap bersifat dualistik. Gender menjadi “ideologi” yang mengarahkan sikap dan perilaku siswa dan guru. Kemudian gender juga diartikan sebagai aspek inti dari identitas diri, menunjuk pada rasa terhadap dirinya sendiri (*self-concept*). Nilai-nilai gender yang dipakai dasar dalam pembentukan *self-concept* akan kurang menguntungkan bagi siswa perempuan. Gender dalam pendidikan juga didefinisikan sebagai serangkaian potensi mental dan perilaku yang dibangun masyarakat sebagai konstruksi sosial yang mengarahkan dan membentuk talenta dan kemampuan setiap orang. Misalkan persepsi bahwa ilmu alam (sains) adalah ranah siswa laki-laki dan siswa perempuan di ranah ilmu sosial. Gender juga didefinisikan serangkaian peran sosial yang dikonstruksi. Hal ini dapat membentuk imaji-imaji siswa tentang peran sosial atau cita-cita siswa menyesuaikan peran gendernya. Serangkaian definisi ini menginformasi bahwa gender pendidikan adalah dimensi psikologis – sebagai dasar problem sosial gender, di samping dimensi sosiologis.

Sekolah sebagai institusi sosial, dapat memajukan keadilan menentang diskriminasi dan sebaliknya juga dapat menjadi sarana penyebar stereotip dan prasangka yang dapat mengekalkan ketidakadilan. Namun dalam kenyataannya sekolah mengkonstruk dan memproduksi ulang ketidakadilan gender yang dari kultur sosial melalui multi dimensi, dapat melalui kurikulum yang nyata maupun tidak nyata dan dapat melalui guru-guru (Gao, 2009). Dengan mengikuti Berger dan Luckman (2013) yang memandang realitas sosial sebagai produk konstruksi sosial gender adalah proses yang berlangsung dalam tiga momen dialektis yang simultan, yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi, serta masalah legitimasi kognitif dan normatif. Konstruksi sosial atas realitas (*social construction reality*) adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realita yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Para sosiolog berasumsi bahwa perbedaan gender dan peran gender adalah dikonstruksi secara sosial dan ditransmisikan kepada tiap generasi melalui agen-agen yaitu orang tua, institusi sosial dan sebagainya. (Galliano, 2003)

Pemikiran-pemikiran tersebut dapat dikonfirmasi dengan fenomena-fenomena dalam proses pembelajaran yang selama ini luput dari perhatian banyak orang, atau karena hal ini dianggap sesuatu yang natural, masing-masing aktor (guru dan siswa) secara dinamis dituntun oleh nilai-nilai gender (*gender norms*) dalam berinteraksi. Fenomena eksternalisasi, perilaku bias gender ditunjukkan oleh seorang siswa perempuan yang secara umum lebih tertib, patuh dan tekun mengerjakan tugas sekolah, mewujudkan peran gender femininnya. Sedangkan siswa laki-laki secara umum seringkali gaduh, berteriak-teriak dan mengganggu teman-temannya, berperilaku iseng dan tidak segera menyelesaikan pekerjaannya, sebagai menjalankan peran maskulin. Tidak jarang sekelompok siswa perempuan merapikan kelas walaupun tidak sedang tugas piket, sedangkan siswa laki-laki kurang peduli dengan kerapihan kelas. Eagly menyebutnya dengan fenomena “*the shared labor”*, laki-laki dan perempuan menjalani (*pass*) pembagian tugasnya. (Eagly H & (et. al), 2004: 202)

Kemudian di dalam proses pembelajaran juga terjadi obyektivasi, ditunjukkan dengan adanya stereotip. Di sekolah sering terjadi fenomena sekelompok siswa laki-laki bermain sepak bola, di tengah halaman sekolah, sedangkan siswa perempuan bermain yang halus misalkan “engklek” di pinggiran atau di depan kelas yang tidak memerlukan tempat luas. Sekelompok siswa perempuan ini seolah memaklumi saja ”penguasaan” halaman sekolah oleh siswa laki-laki karena memang biasanya begitu. “Penguasaan” halaman oleh anak laki-laki dianggap sebagai hal yang biasa/pantas dan seolah disetujui dan tidak pernah dipermasalahkan oleh guru, dan berlangsung sejak dulu. Perilaku bias gender ini menjadi terinstitusionalisasi – menjadi pola interaksi siswa laki-laki dan perempuan di sekolah di masa selanjutnya. Sedangkan fenomena internalisasi gender seperti, siswa laki-laki masuk dalam klub sepak bola, sedangkan siswa perempuan masuk kelompok tari.

Konstruksi sosial ini menjadi sesuatu yang diskrminatif (mendiskriminasi), karena mendasarkan pada kepercayaan (*beliefs*); prasangka (*emotions*) dan kecenderungan-kecenderungan (*tendencies*) secara diametral, kelompok (jenis kelamin) laki-laki dengan konstruksi maskulinitas lebih diunggulkan dibanding dengan kelompok jenis kelamin perempuan- dengan konstruksi femininitas. Konstruksi sosial demikian menciptakan karakter relasional antara laki-laki dan perempuan menjadi subordinatif, marjinal, *division of labor*, mengandung kekerasan (*violence*) (Fakih, 2008), dapat mewujud dalam sikap dan perilaku serta sistem (sosial) perlakuan antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan termasuk pendidikan.

Perilaku guru juga menunjukkan fenomena bias gender, mungkin tidak disadari guru lebih sering memanggil, memperhatikan, menegur, mengingatkan dan sebagainya kepada siswa laki-laki daripada siswa perempuan. Hal ini dapat berakibat adanya percaya diri yang lebih besar pada siswa laki-laki karena intensitas interaksinya dengan guru walaupun sebenarnya hal itu disebabkan oleh pola sikap dan perilaku siswa laki-laki yang sering gaduh. Sosilisasi nilai-nilai gender juga dilakukan oleh guru dalam interaksinya dengan siswa di kelas (Santrock, 2008). Guru membantu perkembangan gender melalui sanksi sosial mempertajam gender siswa laki-laki dan perempuan. Internalisasi nilai-nilai gender yaitu guru menjadi model yang berperan kuat. Siswa laki-laki mempelajari model laki-laki yang bernilai dan berharga tinggi seperti perilaku agresif dan atletis. Sedangkan siswa perempuan mempelajari model keperempuanan yang dihargai tinggi yaitu penampilan yang menarik dan kepedulian terhadap orang lain.

Dengan demikian dalam proses pembelajaran terjadi dan berlangsung sosialisasi nilai-nilai gender oleh semua aktor dalam interaksinya. Tanpa disadari interaksi sosial ini dapat menguatkan identitas gender dan identitas peran gender siswa. Identitas gender adalah identifikasi diri seseorang sebagai laki-laki dan perempuan. Identitas peran gender adalah gambaran yang dimiliki oleh seorang individu tentang dirinya sendiri sebagai seseorang dengan karakteristik maskulin atau feminin. Peran gender merupakan suatu potensi atau skema berpikir bagi laki-laki atau perempuan untuk memandang dirinya, bersikap dan berperilaku sosial. Identitas peran gender dan identitas seksual menurut Woolfolk adalah menjadi dasar dari diskriminasi (Woolfolk, 2007). Semua ini mendorong siswa untuk berperilaku bias gender atau dituntun oleh nilai-nilai gender. Suatu proses sosial yang tidak adil, karena dapat mempengruhi optimalisasi pencapaian pendidikan siswa.

Dengan mendasarkan pada uraian teoritis di atas untuk menginvestigasi dan memahami fenomena diskriminasi gender dalam proses pembelajaran adalah pada interaksi sosial yang terjadi di dalam proses pembelajaran yaitu guru terhadap siswa, perilaku antar siswa secara individual dan kelompok. Pada level kognitif gender mempengaruhi bagaimana kita berpikir terhadap diri sendiri, tentang orang lain dan dunia secara umum. Pada level afektif tentang bagaimana masyarakat merespon kita secara emosional dan level *behavioral* mengenai bagaimana seseorang berperilaku dalam lingkungan dan situasi tertentu (Galliano, 2003). Proses sosialisasi ini mewujud dalam interaksi dalam proses pembelajaran, menguatkan identitas gender para aktor Pendidikan (siswa, guru dan lainnya), merupakan pola tindakan diskriminatif.

Bentuk tindakan diskriminatif ini misalnya ketidakseimbangan perhatian guru terhadap siswa, terbentuknya *self-concept* siswa yang bias gender, persepsi dan ekspektasi siswa maupun guru dalam pendidikan, *gender lessons*, *carrier preparation* dan sebagainya (Galliano, 2003). Dampak dari semua itu bagi siswa dapat mengarah pada antara lain ancaman stereotip, *self-concept* yang kurang positif, penilaian kemampuan diri sendiri, *self-performance*, *shortchanged* *educational attainment*. Review ringkas diskursus gender dalam pendidikan ini menjadi dasar interpretasi problem publik gender sebagaimana yang dicantumkan sebagai rumusan dalam kebijakan PUG pendidikan tersebut.

**Pembahasan**

**Problem Publik Gender : Legitimasi Sosial**

Informasi di sekitar penetapan isu agenda Kebijakan PUG penting dikaji untuk mengetahui latar belakang penetapannya sebagai problem publik. Penetapan problem sosial gender menjadi problem publik gender, pertama dapat dievaluasi berdasar “*timing*”. Pemerintah menetapkan kebijakan PUG dalam pembangunan pada tahun 2000- Inpres Nomor 9 tahun 2000 - dua tahun setelah terjadi gerakan reformasi sebagai puncak keresahan masyarakat dari tekanan otoritarianisme rejim Orde Baru. Dalam situasi krisis nasional saat itu secara normatif lebih membutuhkan isu agenda kebijakan yang bersifat kausatif dengan krisis tersebut, agar dapat membantu mempercepat pemulihan situasi dan kondisi nasional akibat krisis. Penetapan problem sosial gender menjadi problem publik gender berdasarkan “*timing*”nya adalah tidak relevan. Penetapan isu agenda kebijakan seperti ini berpotensi menimbulkan masalah mengurangi legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadapnya. Isu agenda kebijakan publik PUG bukan merupakan permasalahan sosial yang dianggap penting saat itu oleh masyarakat.

Kedua, dari perspektif politis penetapan problem publik gender merupakan produk kekuasaan yang tidak jauh dari kepentingan (seseorang/sekelompok orang) dalam suatu institusi pemerintah, karena karakter utama politik adalah kepentingan. Penetapan gender sebagai problem publik dengan demikian terjadi secara cepat, sebagai tindak lanjut pemerintah meratifikasi konvensi internasional tentang problem sosial gender. Tidak sempat ada sosialisasi sebelumnya, dan kebijakan ditetapkan oleh elit nasional. Penetapan kebijakan yang *state* – *centric* atau *top-down* ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Problem publik gender bukan merupakan hasil tuntutan masyarakat saat itu. Dari perspektip ini penetapan problem sosial gender menjadi problem publik gender adalah lemah legitimasi sosialnya, sebab syarat suatu problem sosial menjadi problem publik secara normatif adalah hasil kompromi dari pertarungan berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat (Putra, 2003). Dengan demikian secara substantif problem publik gender tidak/belum mendapat dukungan kuat masyarakat, berdampak pada adanya keterasingan masyarakat terhadap kebijakan publik gender bahkan prasangka.

Ketiga, walaupun menarik bagi sebagian golongan masyarakat sebagai strategi pembangunan nasional, tidak sedikit yang merespon cenderung negatif terhadap problem publik gender. Di samping karena bersifat “peka”, problem publik gender adalah sistem nilai dari Barat, mempromosikan *gender equality* dan dianggap sebagai target sivilisasi Barat *(western* *civilization*) lebih dari lima dekade ini (Rica Popa & Felicia Bucur, 2014). Problem publik gender seolah mengusik “zona nyaman” struktur sosial terkait status dan peran sosial perempuan dan laki-laki yang sudah mapan dalam tradisi kultural yang ada. Mereka menganggap banyak nilai-nilai gender yang bertentangan dengan sistem kepercayaan kultural masyarakat yang telah dipraktikkan dalam kehidupan bersama.Selain itu adalah fakta bahwa ada fenomena masyarakat “*doing gender*” dalam praktik kehidupan bersama (Eagly H & (et. al), 2004), indikasi kuatnya nilai-nilai kultural gender dalam praktik kehidupan di masyarakat.

Uraian singkat pembahasan problem publik gender di atas menujukkan bahwa kandungan masalah yang cukup mendasar dari kebijakan PUG gender (pendidikan) adalah tingkat penerimaan masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan gender. Problem sosial gender bukan hanya belum dikenal masyarakat, namun juga banyak prasangka bahkan negasi masyarakat sebelum memahaminya. Diskursus gender dipandang bertentangan dengan nilai-nilai ideologis, baik berkaitan dengan penafsiran ajaran religius (Nasaruddin, 2010) maupun nilai-nilai kepercayaan kultural yang sudah dijalani sebagai norma sosial masyarakat sejak dulu. Kondisi kultural masyarakat ini diperkuat oleh sistem kultur patriarkhi yang cukup kuat. Di masyarakat patriarkhi, yang memberikan keistimewaan kepada jenis kelamin laki-laki untuk dapat mengakses *basis of power* dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki menjadi kelompok dominan dan subordinatif terhadap perempuan. Demonstrasi penolakan terhadap RUU KKG dan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) menunjukkan permasalahan legitimasi sosial problem publik gender ini sebagai contohnya.

**Kebijakan PUG Pendidikan : Pragmatisme, Prudence dan Sosialisasi**

Memahami formulasi kebijakan publik adalah menjadi kunci untuk mendalami Tujuan (*Goals*) kebijakan dan cara pencapaiannya serta hal-hal substantif dari konten kebijakan. Proses formulasi kebijakan adalah proses mengembangkan alternatif kebijakan untuk diselaraskan dengan tujuan kebijakan (Dye, 2017), merupakan hal mendasar karena berpengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan publik (Grindle, 1980). Formulasi Inpres nomor 9 tahun 2000 yang menjadi dasar pertimbangan penetapan problem publik gender adalah konteks koordinasi kebijakan internasional. Ini berarti penetapan gender menjadi sentral dalam pembangunan bukan merupakan problem sosial yang dituntut masyarakat. Keinginan pengintegrasian gender dalam pembangunan merupakan isu transfer dari yurisdiksi lain. Karakter kebijakan yang demikian menghasilkan permasalahan potensi dalam pencapaian tujuannya, menghalangi potensi pragmatismenya. Kebijakan PUG pendidikan menjadi hal yang “asing” bagi masyarakat. Problem publik gender kurang mendorong tumbuhya komitmen kuat dan kesadaran masyarakat, dan implementor.

Problem publik gender diformulasikan dengan menggunakan pendekatan makro - sebagai konsep yang mengacu pada tanggungjawab dan peran laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan budaya masyarakat. Pendefinisian demikian lebih bersifat institusional, tidak menunjuk pada level struktural sosial dan tidak mencakup level interubyektif-individual dan psikologis-sosial. Pendefinisan yang institusional ini berarti mereduksi hakekat problem gender, dan lebih menyederhanakan struktur problemnya. Sementara itu dari penjelasan di atas, problem publik gender adalah kompleks, bersifat sosiologis dan sekaligus psikologis, struktural sosial dan intersubyektif.

Penyederhanaan struktur problem sosial gender ini berakibat pada pemaknaan tujuan kebijakan -mewujudkan KKG, menjadi juga tidak terstruktur, dan ambigu, luas dan tidak jelas batasannya. KKG diartikan sebagai kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan dalam mengakses, berpartispasi, mengontrol dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Pemaknaan tujuan yang demikian tentu bersifat dangkal. Dengan mengikuti pemikiran Friedmann pemberdayaan perempuan yang demikian lebih bersifat teknis saja, tidak bersifat srategis (Friedmann, 1998) Sedangkan dari penstrukturan problem publik gender, yang menjadi dasar problemnya adalah model mental – relasi kekuasaan, sehingga secara normatif upaya mencapai KKG mendasarkan pada model mental ini.

Sebagai konsekuensi logis dari pendefinisian konsep problem publik gender yang sempit, kemudian pendefinisian KKG pendidikan sebagai tujuan (*goals*) kebijakan PUG pendidikan tersebut, menyebabkan strategi kebijakan yang dicantumkan dalam formulasinya juga bersifat teknis dan institusional. Eliminasi Diskriminasi gender sebagaimana dicantumkan dalam kebijakan PUG pendidikan diupayakan dengan “pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian pemasalahan perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan ke dalam perencanaan pendidikan berperspektif gender” tidak mendasarkan pada strukturisasi permasalahan sosial gender tersebut. Dari segi pragmatisme, ada kesenjangan yang cukup kuat antara tujuan yang ditetapkan (mencapai KKG) dengan strategi pencapaiannya yang mendasarkan pada definisi problem sosial gender secara makro (institusional), telah membatasi persoalan dari informasi mengenai problem gender dari perspektif psikologis – yang menjadi dasarnya. Dari sudut pandang ini, strategi kebijakan PUG pendidikan tidak pragmatis, karena informasi ilmiah problem ketidakadilan gender pendidikan adalah lebih pada interaksi aktor-aktor dalam proses pembelajaran, bukan hanya pada aspek institusional saja.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan PUG pendidikan tidak mempunyai potensi yang cukup kuat dari segi sifat pragmatisnya. Karakter kebijakan PUG pendidikan kurang kuat karakter “*action oriented*” nya. Serangkaian kebijakan PUG pendidikan: Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembanguan dan Permendiknas Nomo2 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pandidikan, dapat menimbulkan permasalahan aspek kekuatan mengikatnya. Inpres adalah keputusan Presiden yang bersifat aturan pelaksanaan program kerja nyata. Inpres sebagai produk Administrasi Negara, digolongkan sebagai peraturan kebijakan (*policy rule*). Peraturan kebijakan merupakan perwujudan tertulis dari diskresi pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah yaitu sarana komunikasi antar pejabat di lingkungan administrasi pemerintahan. Secara normatif Inpres tidak termasuk dalam hirarkhi perundangan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, walaupun secara nyata ada dalam penyelenggaraan pemerintahan karena tidak bisa dihindarkan (Imurana, Haruna, & Kofi, 2014)

Status hukum Inpres demikian menyebabkan kekuatan mengikatnya tidak besar/efektif. Jadi mendasarkan “status” Inpres, kebijakan PUG ini, menimbulkan interpretasi mengarah pada makna efek “simboliknya”. Interpretasi demikian didasarkan pada analisis bahwa problem publik gender yang begitu kompleks dan mendasar , menyangkut sistem nilai “hanya” akan diselesaikan dengan kebijakan “setingkat” Inpres. Oleh karena itu sebagaimana Parson meyatakan kebijakan publik adalah “melakukan sesuatu” tinimbang “memecahkan problem” (Parsons, 2008) Menurutnya dalam pandangan pembuat kebijakan, adanya sebuah kebijakan “sudah menyelesaikan masalah” atau suatu kondisi sudah diperbaiki, padahal kenyataannya semua itu hanya simbol-simbol yang dimanipulasi. Publik ditenteramkan dengan tindakan seperti itu ada hanya dengan cara itu pembuat kebijakan memperkuat dan mempertahankan legitimasinya. Namun pandangan pesimistik ini menafikan komitmen pemerintah. Dari sisi positifnya, dengan adanya problem publik gender ini merupakan “*starting* *point*” dan sosialisasi dan memberi peluang masyarakat mengenal dan memahami yang selanjutnya secara bersama berupaya mencapai tujuan KKG sedapat mungkin.

Namun mengapa pemerintah menetapkan Inpres ini di saat suasana krisis, dapat dianalisis dengan menghubungkannya pada kepentingan otoritas saat itu dan dalam konteks global. Salah satu akibat dari globlisasi adalah timbulnya interdependensi internasional dalam hal pembangunan ekonomi, termasuk Indonesia. Ditetapkannya kebijakan PUG sebagai pilihan pemerintah untuk menyelesaikan problem ketidakadilan gender di berbagai bidang kehidupan tidak terlepas dari desakan pengaruh globalisasi sosial dan ekonomi, mempengaruhi institusi sosial untuk mengurangi subjugasi perempuan dan mempromosikan keadilan gender (Lestari, Anshari, & Dahlan, 2016). Ratifikasi Gender *mainstreaming* dalam kebijakan nasional dianggap sebagai lebih menunjukan adanya “*soft coercion*” daripada suatu prinsip mendasar dalam pencapaian keadilan gender (*gender equality*). (Basheka & Vyas-Doorgapersad, 2015) Secara sederhana hal ini bisa dipahami sebagai penjelasan bahwa betapa masalah besar (transformasi sistem nilai sosial) gender yang kompleks diupayakan perencanaannya “hanya” dalam waktu singkat dan tanpa partisipasi rakyat serta perencanaan jangka panjang dan deliberatif. Kondisi krisis saat itu mendorong pemerintah mengambil keputusan yang mudah dan dapat dilakukan dengan cepat tanpa menunggu persetujuan Lembaga perwakilan rakyat.

Pembentukan kebijakan (*policy reform*) oleh elit kebijakan nasional merupakan hasil sistemik dan struktural masyarakat internasional – suatu koordinasi kebijakan internasional – “*Epistemic* *Community*” (Reilly, 2013). Kebijakan para elit dipengaruhi oleh informasi tentang problem sosial yang minim juga kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan. Peran elit yang besar dan kerapuhan (*vulnerability*) pembangunan mendorong negara masuk ke dalam “*sphere of* *influence*” agen asing dengan tekanan cukup intensif melakukan perubahan yang direkomendasikan. Pilihan perubahan sering menjadi kondisi –kondisi untuk “*reward*” oleh aktor-aktor internasional dan akan mempengaruhi hubungan antar mereka (negara dan aktor internasional). Tuntutan keadilan gender bidang pendidikan yang disuarakan oleh masyarakat internasional, merupakan suatu tekanan bagi Negara Berkembang dari komitmen finansial kepentingan pemerintahnya dari negara-negara donor. (Reilly, 2013)

Dapat disimpulkan bahwa penetapan isu kebijakan PUG pendidikan lebih disebabkan terbatasnya pilihan yang dimiliki pemerintah atau “*no choices*” (menerima dengan *agak* terpaksa) tuntutan dan rekomendasi lembaga *powerful**bodies* seperti IMF (*International Monetary Fund*) dan World bank (Basheka & Vyas-Doorgapersad, 2015) sebagai lembaga pemberi pinjaman (*loan*) dana pembangunan. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi pendapat Kebijakan publik “yang dengan bantuan” organisasi internasional seperti IMF dan World bank, seringkali tidak memasukkan realitas dan dinamika lokal sebagai pertimbangan. (Darwin & Tukiran, 2001).

Dalam konteks seperti itu tindakan pemerintah menetapkan kebijakan PUG merupakan sikap *prudence* dalam hubungan internasional. Pemerintah berada dalam posisi di persimpngan antara upaya penyelesaian krisis di berbagai aspek kehidupan, dalam tekanan “pergaulan” internasional dan kebutuhan dana untuk menyelesaikan krisis. Maka tindakan menetapkan kebijakan PUG adalah pilihan yang “terbaik”. Dari perspektif yang netral, telah terjadi kongruensi antara kebutuhan pemerintah akan sumberdaya untuk menyelesaikan krisis di berbagai aspek kehidupan dan di pihak lain ada kepentingan masyarakat internasional yang cocok, sehingga saling menguntungkan, paling tidak dari perspektif pembuat kebijakan.

**Ketidakadilan Gender : Kompleks dan *Power Relationship***

Problem sosial gender bersifat kompleks, meliputi beberapa dimensi antara lain sosiologis, psikologis, power, antropologis (Burr, 1998; Eagly H & (et. al), 2004; Galliano, 2003). Sebagai konstruksi sosial sistem nilai gender dipraktikkan oleh semua orang, pada posisi yang tumpang tindih – intersubyektif. Seorang aktor interaksi sosial seringkali pada saat yang bersamaan berada pada posisi subyek sekaligus obyek. Seseorang yang mempunyai kesadaran gender akan sering mengalami hal ini. Misalkan seorang perempuan yang “agresif” dengan ambisi untuk maju dalam suatu lingkungan tertentu akan berada dalam “tekanan” yang cukup kuat oleh sistem nilai gender yang didukung secara “otoritatif” sistem norma lainnya, penapsiran nilai relijius, adat kebiasaan dan lainnya. Sikap agresif perempuan tersebut tidak pantas sebab keluar dari kotak gendernya” bahkan dapat dianggap sebagai “menentang” sistem nilai yang ada. Pada prinsipnya upaya mengeliminasi ketidakadilan gender adalah konfliktual, menentang normatif.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, dengan mengikuti pemikiran Berger dan Luckmann, gender adalah proses melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif, berlangsung dalam tiga momen dialektis yang simultan yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi, serta masalah legitimasi dimensi kognitif dan normatif (Berger & Luckmann, 2013). Fenomena sosial momen dialektis ini seperti masyarakat doing gender adanya *the shared labour* dan *pass* tugas pembagiannya dan melalui *cultural repertoir of gender* yang terbagi secara sosial (Eagly H & (et. al), 2004: 201-203). Fenomena gender disimbolkan dalam pepatah “*Body as the battle range*” (Galliano, 2003).

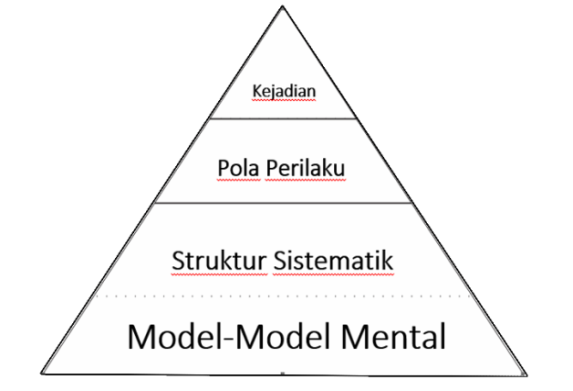
Pada level sosial struktural dan juga institusional, konstruksi sosial ini di bawah kondisi kultur patriarkhal. Patriarkhi adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik dimana laki-laki mendominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan (Walby, 2014) Sistem nilai gender beroperasi di dalam sistem struktur sosial patriarkhi, sehingga saling menguatkan. Perspektif yang dekat dengan patriarkhal ini adalah kekuasaan. Fenomena ketidakadilan gender bernuansa kekuasaan (power), sehingga memahami ketidakadilan gender adalah memahami unsur power di dalamnya, dasar-dasar dari power yaitu *force*, *resources* *control*, *ideological* *advantage* *and* *assymetrical* *obligation*. (Eagly H & (et. al), 2004)

Karakter problem sosial ketidakadilan gender selain itu juga bersifat tidak kentara, tidak bisa diterima dan dipahami dengan mudah. Dimensi psikologis problem publik ketidakadilan gender bersifat pervasif, meresap, bisa tidak disadari, dirasa sebagai fenomena biasa yang berjalan dalam waktu yang lama. Problem sosial gender merupakan *legacy* yang sedang berjalan (*on going*), mendapatkan legitimasi normatif cukup kuat dari sistem nilai lainnya, relijius, adat kebiasaan, jadi permasalahan ketidakadilan gender mengandung ‘penentangan normatif’. Dari dimensi lain, hal mendasar dari problem sosial gender adalah otonomi dan opresi (Veltman & Piper, 2014). Kekuatan otonom dianggap dapat menghilangkan kekuatan-kekuatan opresif manusia. Otonomi dapat mendorong emansipasi dan untuk memberi makna terkait isu mendasar perempuan – kehendak-kehendak, pilihan-pilihan, identitas perempuan. Otonomi adalah integral dalam kehidupan yang baik. Otonomi bersifat relasional, berelasi pada konteks sosial dan personal.

Ketidakadilan gender di bidang pendidikan, dapat dikaji dalam proses pembelajaran. Ketidakadilan atau diskriminasi pendidikan diindikasikan dengan adanya proses sosialisasi gender norms yang menguatkan identitas gender dan identitas peran gender siswa. Kedua hal ini mewujudkan ketidakadilan gender karena siswa akan berperilaku sebagaimana skema gender, mengafirmasi identitas peran gendernya.Akibatnya otonomi siswa cenderung berada di bawah tekanan nilai-nilai gender, menghalangi pemfungsian hak dan kapabilitas potensi dirinya mencapai hasil pendidikan secara optimal. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa problem sosial gender adalah kompleks. Memahami ketidakadilan gender dalam dimensi relasional membutuhkan dasar legitimasi yang dinamis. Menurut Galliano (2003), problem sosial gender adalah *in* *context* Sebagai suatu sistem nilai, gender tidak bekerja di ruang hampa, banyak aspek yang menjadi faktornya.

Dengan demikian prinsip-prinsip eliminasi diskriminasi gender harus dikembalikan pada karakter problem sosial gender tersebut. Eliminasi diskriminasi gender secara normatif bersifat kompleks, meminimalisisasi intensitas *power relationship* menjadi posisi yang saling menguntungkan antar pihak (laki-laki dan perempuan) atau setara, dan mensyaratkan legitimasi baik kognitif maupun normatif. Penjelasan ini untuk menunjukkan bahwa mencapai tujuan kebijakan mewujudkan keadilan gender adalah berat dan sulit (untuk tidak mengatakan tidak mungkin).

Karakter problem publik yang demikian kompleks dapat dibantu menguraikannya dengan cara antara lain dengan penstrukturan problem publik gender. Penstrukturan problem gender dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas problemnya, sehingga didapat susunan hirarkhis yang dapat dipakai untuk memformulasi kebijakan secara bertahap dan fokus – jelas batasannya. Berikut adalah reka struktur problem sosial gender, sebagai digambarkan berikut : Gambar teori *iceberg*.

Gambar 1.1 Skema Teori *“Iceberg”*

(Widodo, 2007: 49)

Kejadian-kejadian diskriminasi pendidikan merupakan fenomena empiris, misalkan perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam hal lama bersekolah, jumlah di suatu tingkat pendidikan tinggi dan sebagainya. Di level di bawahnya adalah pola perilaku yaitu: subordinasi, marjinalisasi, *division of labor* dan *vilance*. Level di bawahnya adalah konstruksi sosial sebagai struktur sistemik. Dan yang menjadi dasar hirarkhis itu semua adalah model-model mental – *power relationship* (unsur utama maskulin).

**SIMPULAN**

Potensi pragmatisme kebijkan PUG (pendidikan) dihambat oleh pertama karakter problem publik gender pendidikan yang kompleks: sebagai suatu konstruksi sosial, terjadi sosialisasi *gender* *norms* dalam interaksi antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran; problem sosial gender bersifat intersubyektif, subtil dan pervasif, serta merupakan hubungan kekuasaan. Semua karakter problem sosial gender tersebut dipraktikkan (*on* *going*) secara bersama, merupakan warisan dan menjadi sistem nilai kepercayaan kultural. Konstruksi sosial ini mengandung *gender norms* (nilai-nilai gender) dan konvensi mengenai maskulinitas dan femininitas dan dapat menjadi “ideologi” – skema berpikir dan bersikap serta berperilaku siswa dalam proses Pendidikan. Nilai-nilai gender diperkuat dan bersinggungan dengan norma sosial lainnya, menjadi sumber legitimasi atas pola pikir, sikap, perilaku baik individual, relasional, maupun sosial masyarakat, juga institusional. Dengan demikian karakter problem sosial gender adalah kompleks, sehingga fenomena diskriminasi atau ketidakadilan gender di bidang pendidikan juga masalah yang kompleks dan sulit. Problem sosial gender sebagai suatu ketidakadilan terkait dengan bidang kehidupan lainnya, atas partisipasi individual; intersubyektif dan sosial struktural, institusional, dasar legitimasinya pada sistem nilai yang banyak dan overlap. Diskriminasi seperti tersebut sebagai suatu sistem nilai dan praktik-praktik interaksi sosial dalam kehidupan manusia adalah sudah terjadi sangat lama, tidak kentara (tersembunyi) dan bisa juga tidak disadari (bisa tidak disengaja, tapi bisa juga disadari). Karakter problem publik gender yang demikian mensyaratkan interaksi intersubyektif untuk resolusinya sebagaimana terjadinya praktik kehidupan yang bias gender. Gender bukan hanya merugikan perempuan tapi juga laki-laki, mensyaratkan tumbuhnya kesadaran yang hakiki dan refleksi pikiran yang jernih dari masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Potensi pragmatisme kebijakan PUG pendidikan juga dipengaruhi oleh latar belakang penetapan isu kebijakannya: dalam situasi krisis, dipengaruhi kuat konteks globalisasi, ada kongruensi kebutuhan pemerintah akan dana dan lembaga-lembaga donor internasional, dan pemerintah dalam posisi “*no choice*”. Kebijakan PUG menjadi “asing” bagi sebagian besar masyarakat. Namun secara politis kebijakan pemerintah saat itu cukup “*prudence*”. Dengan pikiran positif, “kehadiran” kebijakan PUG (pendidikan) menunjukkan komitmen, pengakuan dan menjadi informasi masyarakat akan adanya problem publik ketidakadilan gender dalam kehidupan bersama selama ini.

Demikian juga proses formulasinya, konsep problem publik gender didefinisikan secara sempit dan sederhana. Dari kajian teoritis, problem sosial gender kompleks, selain beraspek sosiologis, beraspek psikologis- sebagai dasarnya. Pendefinisian konsep gender yang demikian berdampak pada penetapan makna tujuannya serupa, yaitu lebih bersifat sosiologis institusional. Pada akhirnya strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuannya lebih bersifat institusional, padahal ketidakadilan gender pendidikan terjadi pada proses pembelajaran, sebagai interaksi sosial dan hubungan relasional.

Upaya yang sebaiknya dilakukan adalah melalui pendidikan kependudukan dan pelatihan bertahap dan kontinyu di setiap kelompok masyarakat, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta mengindahkan kearifan lokal. Di bidang pendidikan dapat dimulai dengan dijadikannya materi diskursus gender sebagai mata kuliah wajib bagi calon guru secara bersamaan diikuti program-program responsif gender di tingkat pendidikan dasar. Perlu transformasi diskursus gender (yang dari Barat ini) diselaraskan dengan nilai kultural sosial lokal, dengan prinsip tidak terkesan menghakimi dan memihak salah satu kelompok jenis kelamin, misalnya memakai konsep atau bahasa yang lebih “ramah” gender.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti berterimakasih kepada penulis-penulis dan penyusun sumber data yang telah mengontribusi konsep, pemikiran dan teori yang sangat meningkatkan naskah. Peneliti juga berterimakasih kepada Yuyun yang telah memberikan dukungan teknis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik. (2017a). *Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009-2018*. Retrieved from https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/20/1611/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-tidak-belum-pernah-sekolah-menurut-provinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-2009-2018.html

Badan Pusat Statistik. (2017b). *Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Ke atas yang Buta Huruf menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009-2018*. Retrieved from https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/06/07/1201/persentase-penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-buta-huruf-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2009-2018.html

Badan Pusat Statistik. (2019). *[IDG] Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Provinsi tahun 2018*. Retrieved from https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1570/-idg-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2018.html

Basheka, B. C., & Vyas-Doorgapersad, S. (2015). Gender Dynamics in Public Policy Management in Uganda (A comparative Perspective of Gender Mainstreaming in Policy Making for the water sector). *African Journal of Public Affairs*, *8*(2), 208–220. Retrieved from https://utamu.ac.ug/docs/research/publications/journals/9210 African Journal of Public Affairs Vol 8 No 3.pdf

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2013). *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. (H. Basari, Trans.). Jakarta: LP3ES.

Broemly, D. W. (1989). *Economic Interests and Institutions*. New York: Basil Blackwell.

Burr, V. (1998). *Gender and Social Psychology Focus* (Tenth). London and New York: Routledge.

Darwin, M., & Tukiran. (2001). *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: PKK UGM dan Ford Fondation.

Demetriades, J. (2007). Gender Indicators : What, Why and How? *BRIDGE Gender and Indictors Cutting Edge Pack*, 1–10. Retrieved from http://bridge.ids.ac.uk/reports\_gend\_CEP. Html#indicators

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson Education Inc.

Eagly H, A., & (et. al). (2004). *The Psychology of Gender*. London: The Guildford Press.

Edison. (2013). Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional : Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*.

Ersoz, A. G. (2012). The Role of University Education in the Determination of Gender Perception: The Case of the Gazi University. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.671

Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedmann, J. (1998). *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Massachusetts: Blackwell Pub Inc.

Galliano, G. (2003). *Gender Crossing Boundaries*. Canada: Kennes State University.

Gao, D. (2009). Gender justice and school education. *Frontiers of Education in China*, *4*(2), 252–267. https://doi.org/10.1007/s11516-009-0013-2

Goodin, R. E., Moran, M., & Rein, M. (2009). *The Oxford Handbook of Public Policy*. *The Oxford Handbook of Public Policy*. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. (M. S. GRINDLE, Ed.). Princeton University Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/j.ctt1m323qj

Handayani, W. (2017). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam menghillangkan Diskriminasi Gender di Bidang Pendidikan (Studi di SD Tersan Gede 1 Magelang Jawa Tengah)*. Universitas Negeri Jakarta.

Handayani, W. (2018). Diskriminasi Gender dalam Pendidikan, *10*(2), 198–224. https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1784

Imurana, B. A., Haruna, R. K., & Kofi, A.-B. N. (2014). The Politics of Public Policy and Problems of Implementation in Africa: An Appraisal of Ghana’s National Health Insurance Scheme in Ga East Distric. *International Journal of Humanities and Social Science*, *4*(4). Retrieved from http://www.ijhssnet.com/journals/Vol\_4\_No\_4\_Special\_Issue\_February\_2014/23.pdf

Instruksi Presiden. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (2000). Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf

Jabar, M., Djamas, D., & Dj, L. (2012). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERWAWASAN GENDER DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG. *Humanus*. https://doi.org/10.24036/jh.v11i2.2153

Kemendikbud, P. (2017). *Statistik Persekolahan RSP 2017/2018*. Retrieved from http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi\_2B40A310-F17C-4315-AF34-1FBA51252C56\_.pdf

Kemenristekdikti, Pdd. (2017). *Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2017*. *Pusdatin Iptek Dikti, Setjen, Kemenristekdikti* (Vol. 1). Jakarta. Retrieved from https://ristekdikti.go.id/epustaka/buku-statistik-pendidikan-tinggi-2017/

Kementrian Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Pub. L. No. 84 (2008).

King, E., & Mason, A. d. (2001). *Engendering Development, Pembangunan Berperspektif Gender Melalui Kesetaraan Gender dalam Hak, Sumberdaya dan Aspirasi*. (M. T, Ed.). Jakarta: Dian Rakyat.

Knoepfel, P., Larrue, C., & Hill, M. (2007). *Public Policy Analysis*. Bristol: The Policy Press University of Bristol. Retrieved from www.policypress.org.uk

Koesoema, D. (2019). Melampaui Kebijakan Zonasi. *Media Indonesia*. Retrieved from https://mediaindonesia.com/read/detail/242897-melampaui-kebijakan-zonasi

Lestari, R., Anshari, T., & Dahlan, M. (2016). Kekuatan Hukum Mengikat Instruksi Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum*.

Majchrzak, A. (1984). *Method for Policy Research* (3rd ed.). London: SAGE.

Maliki, Z. (2010). *Sosiologi Pendidikan* (Gajah Mada). Yogyakarta.

Nasaruddin, U. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al Qur’an*. Jakarta: Dian Rakyat.

Nugroho, R. (2009). *Public Policy, Dinamika Kebijakan-Analisa Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.

Parsons, W. (2008). *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan*. (T. W. B. S, Trans.). Jakarta: Kencana.

Peraturan Presiden. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Pub. L. No. 2 (2015). LN.2015/No.3.

Putra, F. (2003). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahayu, W. K. (2017). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*.

Reilly, N. (2013). Gender Equality Policy and Gender Mainstreaming in Irish Aid: From Diffusion to Dilution to Disappearance? *Irish Studies in International Affairs*, *24*, 237–257. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/42912421

Rica Popa, O., & Felicia Bucur, N. (2014). Gender Discrimination and Education Practiioner, Reality, Perception, Possible Solutions. *Procedia*, *127*(Sosial and Behavioral Science), 459–463. Retrieved from http://www.sciencedirect.com

Santrock, J. W. (2008). *Psikologi Pendidikan*. (T. W. BS, Trans.). Jakarta: Prenada Media.

Thomas, J. W., & Grindle, M. S. (2006). Political Leadership and Policy Characteristics in Population Policy Reform. *Population and Development Review*. https://doi.org/10.2307/2807939

Tresiana, N. (2015). PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER DI PROVINSI LAMPUNG (EDUCATION POLICY FORMULATION OF GENDER PERSPECTIVE IN LAMPUNG PROVINCE). *Jurnal Borneo Administrator*, *11*(2). https://doi.org/10.24258/jba.v11i2.192

UNNES. (2016). *Data Mahasiswa Aktif Tahun 2016*. Retrieved from http://data.unnes.ac.id/index.php/mhs/aktif

USAGI. (2002). *Gender Mainstreaming An Overview*. New York: United Nation. Retrieved from https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/e65237.pdf%0Dhttps://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/e65237.pdf%0D

Veltman, A., & Piper, M. (Eds.). (2014). *Autonomy, Oppression, and Gender*. Oxford. Retrieved from https://philpapers.org/archive/MEYTFD.pdf

Walby, S. (2014). *Teorisasi Patriarki*. (M. K. Parsela, Trans.). Yogyakarta: Jalasutra.

Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Woolfolk, A. (2007). *Educational Psychology* (Tenth). New York: Pearson Education Inc.